

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era Presiden Joko Widodo pembebasan tahanan politik (Tapol) di anggap sebagai bagian dari solusi masalah Papua. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua membuat nama Indonesia terpuruk, konflik itu terjadi karena ada unsur teritori, sumber daya alam, kepentingan negara-negara luar dan berlangsungnya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat Papua (orang asli Papua - OAP).

Pembebasan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap seluruh tahanan politik di Papua merupakan salah satu kebijakan utama Jokowi pada awal Mei tahun 2014. Sementara itu lima narapidana di Papua mendapatkan grasi atau pengampunan oleh Presiden Jokowi. Nama-nama mereka adalah Linus Hiluka, Apot Nalogolik Lokobal, Numbunga Telengen, Kimanus Wenda, dan Jefrai Murib. Berdasarkan pertimbangan politik pembebasan dilaksanakan pada bulan Agustus menjelang hari kemerdekaan Indonesia, tercatat ada 31 nama lainnya yang langsung diusulkan untuk mendapatkan pengampunan grasi setelah Linus dan kawan-kawan tersebut.

Kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua tidak dapat dipungkiri seperti penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil yang belum diselesaikan. Hingga adanya perbedaan antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia yang harus diakui bahwa ada segregasi politik, ekonomi, dan psikologis masyarakat secara umum, dan

pemerintah menempatkan orang-orang Papua sebagai pemberontak. Padahal yang sebenarnya adalah mereka melawan ketidakadilan, dan berbagai kekerasan yang menimpa hidupnya. Pemerintah pusat selama ini belum memperlihatkan sikap dan belum memberikan hasil yang maksimal.

Pada tahun 1999 dibawah pimpinan Presiden B.J. Habibie membentuk lima Provinsi baru baru yang ada di papua (dulu bernama Irian Jaya), yaitu, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimiki dan Kota Sorong. Semua ini kerjakan agar dapat memudahkan pengutan integrasi Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun, rakyat Papua menolak kebijakan pemekaran tersebut, mereka menganggap kebijakan ini dilakukan tanpa sepengetuhan atau tanpa pemungutan suara dari rakyat Papua. Pada akhirnya terciptanya OTSUS (Otonomi Khusus) akibat dari penolakan kebijakn tersebut.

Konflik antara Papua dan Pemerintah Indonesia masih terus berlanjut, hingga terjadinya pembobolan gudang senjata di markas KODIM Wamena pada tanggal 4 April 2003 yang dipimpin oleh Linus Hiluka (Organisasi Papua Merdeka) bersama dengan empat orang lainnya. Dengan terjadinya pembobolan gudang senjata dan penyerangan di Kodim 1702 Wamena, pemerintah Indonesia dan TNI mencari tahu dan menyelidiki perijinan operasi tersebut dan akhirnya terungkaplah bahwa perijinan tersebut dilakukan oleh Linus Hiluka karena secara politik wilayah operasi itu ada dibawah naungan Linus Hiluka, maka pada 6 Mei 2003 Linus Hiluka ditangkap di Ibele sekitar pukul 03:30 WIT oleh pasukan TNI. Dalam penangkapan itu terjadi kontak senjata sehingga menewaskan satu orang yang

bernama Kabelek Hiluka. Linus Hiluka di siksa dengan sepatu laras, diludahi, dipukul menggunakan senjata hingga dia kehilangan indera pendengaran, penyiksaan ini terjadi sampai pukul 07:20 WIT, anggota TNI mendapatkan barang bukti berupa dua kain Bendera Bintang Fajar, peta Kemerdekaan Papua beserta surat-surat lainnya.

Linus Hiluka mengizinkan pembobolan itu karena setelah Theys Eluay wafat tidak ada reaksi apapun untuk melanjutkan perjuangan Papua merdeka, maka Linus Hiluka memilih jalan lain satu-satunya adalah operasi pertahanan Militer TNI. Pada 4 April 2003 terjadi penyerangan pada Markas Kodim 1702 Wamena dengan cara membobol gudang senjata, beberapa TNI melakukan perlawanan namun akhirnya TPN-OPM berhasil menggugurkan anggota TNI yang bertugas saat itu dan berhasil membawa lari senjata milik TNI. Setelah terjadinya pembobolan gudang senjata, TNI melakukan operasi besar-besaran di Wamena sehingga beberapa anggota TPN-OPM melarikan diri ke hutan, beberapa anggota tertangkap, dan anggota lain berhasil di lumpuhkan oleh Militer Indonesia.

Linus Hiluka dan Kimanus Wenda di fonis 19 tahun 10 bulan, 3 yang lain yakni Jefrai Murib dan Numbunga difonis seumur hidup, dan yang terakhir Apot Nalogolik difonis 20 tahun. Dua dari lima tapol tersebut di datangkan dari Biak dan dua orang dari Nabire. Hanya Jefrai Murib yang di tahan di Abepura, bersama Filep Karma akan di bebaskan juga tetapi dia menolak alasannya dan tidak ingin mengajukan grasi, karena dia merasa tidak bersalah dan meminta Presiden memberi Amnesti tetapi Presiden tidak mau memberikannya karena hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan prosesnya memakan waktu yang cukup lama.

Permasalahan yang terjadi di Papua belum sepenuhnya selesai, hingga terciptanya OTSUS (Otonomi Khusus) belum mampu meredakan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Pembebasan tahanan Politik yang dituduh melakukan makar di Papua masuk dalam rencana Presiden Jokowi empat tahun yang lalu (2014). Adanya pembebasan tapol-napol Papua yang diberikan oleh Presiden merupakan sebuah upaya untuk saling memahami apa yang di inginkan masyarakat Papua dan apa yang diminta oleh pemerintah. Lenis Kogoya, staf khusus presiden untuk permasalahan Papua menjelaskan bahwa setelah adanya pembebasan tapol-napol ini masyarakat Papua akan segera melakukan dialog yang intensif yaitu melalui lembaga masyarakat adat Papua.

Presiden Jokowi sempat berpidato setelah memberikan grasi kepada lima orang dilapas Abepura-Jayapura bahwa pembebasan tapol-napol Papua akan direncanakan secara bertahap. Pembebasan ini di apresiasi sebagai semangat untuk membangun masyarakat sipil Papua yang harus diperhatikan bahwa mereka yang dibebaskan ini membutuhkan pembinaan yang efektif. Lebih lagi diharapkan apabila mereka bisa dibina untuk segera masuk ke dalam sistem pemerintahan karena mereka merupakan *genuine leaders*, yang harus bisa di integrasikan dalam pemerintahan yang sedang berjalan, sementara itu pendekatan dialog yang dilakukan oleh Presiden terhadap rakyat Papua terbukti terjadi dalam cara untuk mengawali pembebasan. Ini adalah awal yang tepat karena seharusnya dalam sebuah negara yang

demokratis tahanan politik harus diusahakan minimal tahanan politik yang banyak didalam sebuah negara maka itu mencerminkan carut-marutnya kepemimpinan negara atas rakyatnya.

Pembebasan ini merupakan langkah strategis karena menjadi sebuah penegasan bahwa pemerintah memiliki *good will* terhadap pembangunan Papua. Pembebasan ini memberikan perasaan lega, karena Presiden ke-7 Indonesia ini berbeda dengan rezim yang lampau disini Jokowi tampil sebagai Presiden sipil, sementara presiden-presiden sebelumnya khususnya Soeharto dianggap sangat militeristik. Di catat pada waktu itu bahwa di antara 5 tahanan yang diberikan grasi terdapat satu atau dua orang yang ingin bersekolah dan Presiden juga berjanji untuk memfasilitasi yang ingin bekerja dan berusaha; Presiden juga sudah memberikan modal untuk hal ini.

Upaya pembebasan Linus Hiluka telah menaikkan citra Jokowi ketingkat yang tinggi. Pembebasan ini sungguh merupakan terobosan yang luar biasa pada masa itu dan di nilai oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan yang dapat mendekatkan hubungan masyarakat di tanah Papua dengan Pemerintah Pusat. Nyatanya sampai hari ini janji Jokowi untuk membebaskan 90-an orang tahanan politik yang lain tidak terjadi sehingga Jokowi hanya membebaskan atau memberi grasi satu kali saja.

Pembebasan lima tahanan politik pada tahun 2014 itu di nilai oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan yang dapat mendekatkan hubungan masyarakat di tanah Papua tersebut dengan pemerintah pusat. Ini sungguh

merupakan awal yang bagus bagi Jokowi untuk langsung dekat dengan masyarakat Papua.

Tujuan dari permintaan pembebasan ini adalah demi pembuktian janji Presiden pada awal pemerintahannya dan merupakan suatu penegasan bahwa masyarakat Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia yang besar. Sehingga di harapkan pada waktu mendatang tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI tidak lagi ada. Selain itu diharapkan ada kepastian bahwa rakyat Papua akan menikmati kemerdekaan seluas-luasnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Yang disebutkan ini semua datang dari sikap tetap dan terus mendukung kebijakan pemerintah. Pembebasan tapol Papua ini adalah sebuah kebijakan yang tidak populer namun berbasis kebenaran hakiki. Dalam hal ini Presiden Jokowi dinilai sudah menggunakan mata hatinya untuk mengambil keputusan terkait pembebasan ini.

Sejak dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gusdur disitulah tokoh-tokoh Irian Jaya dibawah pimpinan Theys Hiyo Eluay membentuk suatu ide yang baru yaitu terbentuklah Perwakilan Dewan Papua (PDP) yang diketuai oleh Theys Eluay dibentuk di Port Numbay atau yang sekarang di kenal dengan Jayapura. Maka Linus Hiluka di panggil beserta Obet Komba, Muriono Murib, Amelia Yigibalong dari Wamena untuk mengikuti Kongres 2000 di Jayapura, lalu di dalam kongres itu Theys menunjuk Obet Komba menjadi Presidium di Wamena, Linus Hiluka dipilih menjadi panel di Wamena. Dengan adanya PDP maka tokoh-tokoh Irian Jaya berdiplomasi dengan Presiden Gusdur, dan Presiden Gusdur mengembalikan hak-hak atau martabat orang Papua seperti nama Irian Jaya

digantikan menjadi Papua, pengibaran bendera Bintang Fajar yang disetujui, oleh karena itu semua orang Papua senang kepada Presiden Gusdur.

Setelah dibentuknya Perwakilan Dewan Papua, maka Theys Eluay menugaskan Presidium dan Panel yang ada di setiap kota untuk melakukan orasi damai dan membuat satgas di setiap kalangan masyarakat Papua, Linus Hiluka sebagai Panel untuk membentuk satgas dan melakukan orasi kepada masyarakat di beberapa tempat di Wamena hingga tahun 2001. Setelah pergantian Presiden secara paksa dari Presiden Gusdur kepada Megawati Soekarno Putri, setelah Megawati menjabat sebagai Presiden, Megawati memberikan OTSUS kepada masyarakat Papua. Pada tanggal 10 November dibawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri ketua PDP Theys Eluay dibunuh oleh Militer Indonesia, yakni Komandan Pasukan (Kopasus) mendengar hal itu seluruh masyarakat Papua berduka, Presidium dan Panel seluruh kota yang ada di Papua datang ke Jayapura untuk melakukan pemakaman Theys Eluay.

Dalam tulisan ini penulis akan mempertanyakan apakah ada peran internasional dalam pemberian grasi. Apakah semua ini mulus dari pemikiran Presiden Jokowi sepanjang 50 tahun intregasi Papua kepada Negara Indonesia konflik antara masyarakat Papua dengan pemerintah terus berlangsung mungkin tidak banyak orang tahu bahwa gerakan untuk menolak hasil Pepera terus berlangsung di tingkat atas atau elit, para pemimpin Papua yang sudah di siapkan oleh Belanda menjadi khawatir. Masalahnya Pemerintah Belanda telah mempersiapkan mereka untuk menjadi pimpinan ketika Papua Merdeka, orang-orang ini di bawa ke Amsterdam untuk di

perkenalkan kepada semua badan-badan negara termasuk DPR Belanda. Kepada DPR Belanda itu elit-elit Papua di perkenalkan sebagai pimpinan-pimpinan pucuk Papua: anggota DPR, kepala-kepala badan, dan orang-orang penting lainnya selain itu Belanda menyiapkan perangkat-perangkatnya juga, antara lain bendera Bintang Kejora dan Himne Papua “ Hai Tanahku Papua”.

Di tingkat persiapan pembangunan aparat pemerintahan Belanda juga menyiapkan sekolah pamong praja (1956) pemuda-pemuda Papua yang pada saat itu berumur 20-an di didik untuk menjadi *Ambtenaar* sekolah, ini di selenggarakan di Holandia dan berlangsung selama 2 sampai 3 tahun kedepan, lulusan-lulusan ini akan di jadikan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin administrasi pemerintahan di kabupaten-kabupaten dan distrik-distrik di seluruh wilayah Papua tetapi segala sesuatu yang disiapkan Belanda ini tidak berjalan seperti yang di cita-citakan. Pemerintah Indonesia terus memprotes penguasaan Belanda atas Papua. Indonesia menuntut pengembalian seluruh wilayah yang di kuasai oleh Belanda tanpa tersisa sedikit pun. Indonesia menyerukan gerakan persatuan bangsa untuk melakukan perlawanan mengusir belanda *all out*.

Di bawah pimpinan Presiden Soekarno gerakan mengusir Belanda ini bergaung hebat sampai ke seluruh negeri, Amerika dan Rusia yang pada saat itu sedang perang dingin dan sangat memperhatikan Indonesia. Indonesia menjadi wilayah yang benar-benar di perebutkan karena di anggap merupakan negara yang strategis baik untuk wilayah Hindia dan wilayah Pasifik. Rusia mengulurkan tangan memberi bantuan alat-alat perang kepada Indonesia: tang-tang, kapal selam, amfibi, dan jet tempur ini yang digunakan

oleh Indonesia untuk memerangi Belanda dalam pertempuran yang dahsyat. Laksamana Yosudarso gugur. Kapal perang yang di komandoinya tenggelam ditembak Belanda selain itu Presiden Soekarno memerintahkan kepada Kolonel Soeharto kelak menjadi Presiden menggantikan Soekarno untuk menyerukan perlawanan besar besaran melawan Belanda atau mengusir belanda dari Papua. Para penerjun payung beruntun di turunkan diatas hutan-hutan Papua dari peristiwa ini kita mendengar nama-nama terkenal antara lain Jendral Murdani, Jendral Sarwoedhie (ayah dari ibu Ani Yudiono). Tak ketinggalan kita mendengar nama srikandi Indonesia Herlina si “pending emas”.

Peristiwa ini segera dicium oleh Amerika yang dengan sigapnya menawarkan Perjanjian New York (1962), di dalam perjanjian New York Indonesia di pertemukan dengan Belanda dan Amerika sebagai penepak dan setelah perjanjian New York, peperangan melawan Belanda pun berakhir selanjutnya konflik di teruskan lewat diplomasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mana mengambil alih konflik dan mengirimkan *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang menjadi pemerintahan sementara. UNTEA inilah yang mempersiapkan penyelenggaraan hingga kemudian menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) (1969).

Seperti yang kita ketahui (cerita singkat pepera) masalah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) ini menjadi sesuatu yang mengganjal di dalam hati para pemimpin Papua mereka merasa di curangi karena hasil dari PEPERA ini langsung di terima oleh PBB dan Papua diintegrasikan kepada Indonesia. Presiden Soekarno kemudian melakukan pembangunan dengan

mendirikan antara lain Universitas Cendrawasih dan mengirim guru-guru dari Sangir Talaut, Toraja, dan Minahasa untuk menjadi guru agar mendidik anak-anak Papua, sebenarnya ini sudah di siapkan Soekarno sebelum PEPERA.

Masalah yang mengganjal ini tidak segera di selesaikan oleh Indonesia. Bahkan dibawah kendali Soeharto kekerasan di mulai sehingga dibangunlah daerah-daerah Daerah Operasi Militer (DOM). DOM meliputi antara lain Merauke, Manokwari, Sorong dan wilayah-wilayah pegunungan tengah. Tahun 1966 Presiden Soekarno di jatuhkan dan meninggal dalam kamar isolasinya pada tahun 1968. Namun pergolakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Oktober 1965) terjadi di dalam negeri sendiri, kerusuhan berlangsung sangat hebat dan Jendral Soeharto yang merasa menerima mandat untuk meredam kerusuhan, menghabisi semua orang yang terindikasi sebagai anggota partai PKI dan semua orde barunya, menteri dan semua aparat dalam pemerintahan Soekarno di gantikan oleh anggota-anggota baru, sehingga di mulailah rembukan-rembukan terkait dengan penambangan emas FREEPORT.

Orang-orang Papua yang tidak puas dengan hasil PEPERA dan mereka pun tidak tinggal diam akan hal ini karena mereka sudah di iming-imingi posisi dan jabatan-jabatan penting lainnya oleh Belanda, karena di dalam pikiran mereka segala sesuatu sudah siap, dari mulai badan-badan, pamong-pamong pemerintahan sampai bendera dan lagu kebangsaan semua sudah lengkap dan mereka meyakini bahwa pada 1 Desember 1960 Papua sudah dimerdekakan oleh Belanda. Rasa kecewa ini berubah menjadi geram dan marah, pada akhirnya mereka melakukan perlawanan seperti pos-pos

pemberontakan dibangun di Manokwari, Merauke, dan perbatasan Mamberamo, tetapi pemerintah Indonesia melalui TNI terus menerjunkan pasukan untuk mengejar mereka, sehingga untuk menyikapi hal ini para pemberontak membentuk organisasi-organisasi antara lain Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) juga cabang-cabangnya di luar negeri antara lain Belanda, Afrika, Papua new Guinea, Vanuatu, dan Inggris.

Lobi Internasional semakin intens dilakukan khususnya mulai tahun 2000, pada tahun-tahun ini gerakan OPM merasa mendapat angin segar melalui pemerintahan Presiden Gusdur. Presiden Gusdur mengembalikan nama Irian Barat menjadi Papua juga memperbolehkan diselenggarakannya konferensi besar dewan adat, dari sini dimulailah pertemuan-pertemuan dan percakapan-percakapan terkait permasalahan Papua. Permasalahan Papua ini semakin intens dibicarakan dan semakin mengerucut dan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyebab dari semua permasalahan ini adalah penerjunan pasukan yang semakin banyak dalam jumlah dan luas penyebarannya.

Dimasa pemerintahan Soeharto, tambang emas Freeport di Timika intensif di kerjakan dan pasukan keamanan-bukan polisi- menjagainya dengan sangat ketat dari orang-orang lokal, khususnya suku Amungme mulai berkonflik dan jatuh korban oleh tembakan pasukan keamanan, selain itu setiap kegiatan masyarakat dicurigai sebagai kegiatan politik dan di bubarkan dengan kekerasan. Intensitas kegiatan usaha dibidang ekonomi selalu di sertai dengan kekerasan, jarang sekali diselesaikan dengan dialog. Itu terjadi di

wilayah tambang-tambang (gas,minyak, emas, dll) juga di perkebunan-perkebunan (kelapa sawit, coklat, dll) serta penebangan hutan. Protes dari rakyat terkait penggusuran dan pemindahan tempat tinggal, dan pembalakan hutan karena tidak di dahului dengan percakapan yang baik dengan masyarakat, semua kegiatan yang terjadi diselesaikan dengan cara kekerasan kegiatan semacam ini selalu mengatasnamakan kepentingan negara dan tidak memperdulikan nasib masyarakat setempat. Pratek-praktek ini sangat melukai rakyat dan menumpuk kebencian terhadap pemerintah Indonesia.

Semua pemerotes di bidang-bidang tersebut (non politik) selalu di stigma sebagai protes politik melawan negara. Akibatnya kalau mereka tidak tewas tertembak mereka akan masuk ke dalam penjara sehingga semakin banyak tapol-napol yang menghuni lapas di Papua. Berjubelnya tahanan politik di dalam penjara-penjara yang ada di Papua telah tersebar ke luar negeri, hal ini disebabkan oleh berita yang dikirim dari kampung kepada saudara-saudara mereka yang merupakan pelarian politik dari luar negeri itu yakni keluarga-keluarga Papua dan simpatisannya yang terus menekan Indonesia. Penekanan antara lain dilakukan melalui organisasi gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perduli Papua dan persekutuan keluarga-keluarga. Hal ini terjadi kerena para pelarian politik tempo hari telah berkeluarga dengan orang-orang setempat dan beranak pinak selain juga bahwa mereka itu ada yang sudah menjadi warga negara setempat karena perkawinan dan juga sudah menduduki posisi-posisi penting dalam pekerjaan.

Terkait dengan tahanan-tahanan politik ini Presiden baru Indonesia Jokowi Dodo mengambil langkah-langkah terobosan dengan mencanangkan pemberian grasi kepada mereka yang mendapatkan hukuman lebih dari 10 tahun dan merencanakan untuk melepaskan semua tahanan politik di masa pemerintahannya, pada kunjungan yang ke-3 di Papua dan di hadapan masa di Paniai Presiden menyatakan maksudnya untuk melepaskan para tahanan politik Papua secara khusus Presiden bermaksud untuk memberikan grasi kepada Linus Hiluka dan kawan-kawan.

Tentu saja sebagai Presiden baru Jokowi ingin membuat citra yang baik atas kepemimpinannya, itu sebabnya dalam pidatonya ia menyebut untuk membuka Papua bagi jurnalis asing namun kehendak baik ini tidak menemui jalan yang mulus, pembebasan tahanan politik hanya berlangsung satu kali saja dan jurnalis asing tetap tidak bisa masuk oleh sebab itu masyarakat internasional sedikit mencibir pada pernyataan Jokowi ini. Selain hal itu berita tentang kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan misterius atas orang-orang Papua (OAP) terus berlanjut dan bergaung sampai ke negara-negara di luar sana. Simpati internasional terus bergulir bagaikan bola salju. Terlebih ketika di tengah-tengah banyaknya korban yang berjatuh pemerintah Jokowi seolah membisu bahkan Jokowi mengalihkan perhatian Internasional dengan melakukan pembangunan ekonomi dia menyatakannya sebagai pendekatan kesejaterahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menanyakan “Bagaimana Peran Internasional Dalam Pembebasan Tapol/Napol Papua Linus Hiluka ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar para mahasiswa/i mengetahui peran Internasional dalam pembebasan Tapol-Napol Papua Linus Hiluka CS di era Jokowi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, diharapkan dapat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran dalam mengembangkan kajian hubungan internasional terkait pengaruh sistem internasional dalam pengambilan kebijakan suatu negara dalam konteks pembebasan Tapol Linus Hiluka CS oleh pemerintah era kepemimpinanan Jokowi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang penting untuk menjadi sumber bacaan dan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Juga rujukan untuk akademisi dan praktisi dalam penelitian lanjutan maupun program-program kebijakan yang meyangkut isu Tapol Papua serta penyelesaian konflik Papua antara pemerintah Indonesia dengan OPM.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan data statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. John W. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2014, 182)

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik yang tampak, cocok untuk memahami interaksi sosial, perasaan orang, membantu mengembangkan teori, memastikan kebenaran data sosial, dan meneliti sejarah perkembangan (Sugianto 2017, 10-11). Secara umum metode penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini yang

membantu memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian pengertian metode penelitian kualitatif diatas maka penulisan penelitian ini sangat tepat untuk menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan masalah yang diangkat terkait Peran Internasional Dalam Pembebasana Tahanan Politik Linus Hiluka CS Di Era Joko Widodo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan data statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. John W. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresell 2014, 182)

Sugiyono mengatakan bahwa metode penlitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik yang tampak, cocok untuk memahami interaksi sosial, perasaan orang, membantu mengembangkan teori, memastikan kebenaran data sosial, dan meneliti sejarah perkembangan (Sugiarto 2017, 10-11). Secara umum metode penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini yang membantu memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian pengertian metode penelitian kualitatif diatas maka penulisan penelitian ini sangat tepat untuk menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan masalah yang diangkat terkait Peran Internasional Dalam Pembebasana Tahanan Politik Linus Hiluka CS Di Era Joko Widodo.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji bersifat sosial dan dinamis, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, tipe penelitian bersifat deskriptif analitik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Secara umum penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama (Setiawan dan Anggito 2018). Penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan logika induktif di mana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang menjelaskan fenomena sosial,

Pada penelitian kualitatif, terdapat beragam metode pengumpulan data atau sumber yang biasa digunakan. Menurut James Mc. Millan dan Sally Schumacer yang dikutip Natalia Nilamasari (2014), setidaknya ada empat strategi pengumpulan data dengan multi-metode dalam penelitian kualitatif: (1) observasi partisipatif; (2) wawancara mendalam; (3) studi dokumen dan artefak; dan (4) teknik pelengkap

Pada penelitian yang berjudul “Peran Internasional dalam Pembebasan Tahanan Politik Linus Hiluka dan kawan-kawan di era Jokowi”, penulis akan mengambil gambaran umum yang meliputi: sejarah atau yang menjadi latar belakang pembebasan tahanan politik di era Presiden Jokowi yang menjadi konflik berkepanjangan di tanah Papua hingga perjuangan pembebasan Linus Hiluka dan kawan – kawan.

1.5.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Jenis-jenis data dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file ataupun dalam terkompilasi. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita

jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Pengambilan data diambil melalui wawancara kepada Linus Hiluka.

- b. Peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti, dokumen (artikel, media internet, jurnal, buku dan media-media elektronik lainnya). Maka dari itu peneliti menggunakan jenis data sekunder yang cocok untuk dijadikan bahan acuan untuk melengkapi penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Data sekunder merupakan sumber kajian yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan penunjang data primer.

1.5.3 Metode Validasi Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Dari data yang terkumpul, akan dilakukan analisis yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital, karena begitu besarnya posisi data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar (Bachri 2010). Menurut Satori dan Komariah (2011) kuran validitas suatu penelitian tergantung pada alat yang digunakan. Dalam observasi, manusia atau *observer* menjadi alat untuk menjaring data yang diinginkan, sehingga validitasnya sangat

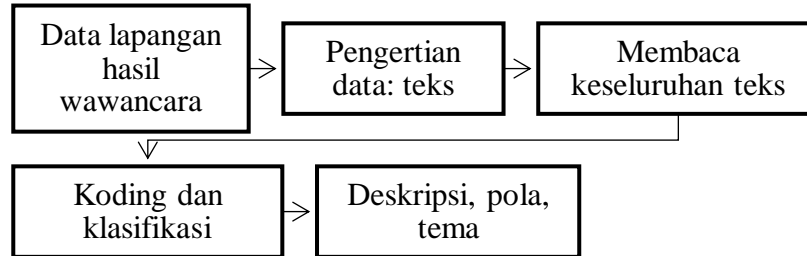
bergantung pada kapasitas *observer* dalam merancang masalah penelitian, menentukan dan memilih subjek, menetapkan cara data dikumpulkan, dianalisis dan dimaknai dan dibuat laporan hasil dari penelitian tersebut di mana semua proses tersebut mengarah pada konsistensi dengan yang lain. Pengembangan validasi yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi terbagi menjadi lima teknik yaitu: triangulasi sumber; triangulasi teori; triangulasi peneliti; triangulasi waktu; triangulasi metode.

Penelitian ini akan menggunakan Triangulasi sumber, di mana penulis akan memastikan tingkat kepercayaan suatu informasi yang tidak hanya dengan satu sumber, melainkan dengan berbagai sumber, seperti melalui buku, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu penulis akan membandingkannya dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dari narasumber.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan valid, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan suatu kaidah dalam penulisan penelitian, tanpa analisis data sebuah penelitian hanya menghasilkan data mentah tanpa memiliki arti. Dengan melakukan analisis data maka data yang diperoleh dapat diolah hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru. Menurut Patton (2009) teknik analisis merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar (Anggito dan Setiawan 2018, 237).

Mengenai pengertian lain tentang teknik analisis data, Creswell menggambarkan proses analisis data kualitatif sebagai berikut:



Dalam melakukan penelitian dibutuhkan analisis data agar bisa mengetahui bentuk permasalahan yang sedang diteliti. Informasi dan data sudah didapat, dikumpulkan dari berbagai sumber lalu dianalisis secara detail.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab. Dalam setiap bab, terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang menjelaskan sejarah singkat Linus Hiluka CS untuk mendapatkan kebebasan dari Presiden Jokowi, pembobolan gudang senjata yang dipimpin oleh Linus Hiluka dan pemberian OTSUS oleh Presiden Megawati kepada masyarakat Papua.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang fokus penelitian.

BAB III: Pembahasan

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan tentang peran internasional dalam Pembebasan Tahanan Politik Linus Hiluka CS Di Era Jokowi

BAB IV: Kesimpulan dan Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait tulisan yang akan peneliti bahas, sehingga ini berguna bagi mahasiswa/i untuk menambah wawasan terkait Peran Internasional dalam Pembebasan Tahanan Politik Linus Hiluka CS di Era Jokowi.